

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro Gunawan dan Yunita Anggarini, 2017. Anggaran Bisnis Analisis Perencanaan dan Pengendalian Laba, edisi pertama, cetakan ketiga, Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anggarini Yunita dan Hendra Puranto, 2010, Anggaran Berbasis Kinerja, Penyusunan APBD Secara Komprehensif, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit :UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Ariel Sharon Sumeng, (2013) Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81
- Aco Andi Tati (2009) Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Barang, Modal dan Bantuan Sosial pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Jurnal (Tidak dipublikasikan)
- Anonim.2014. Laporan Tahunan.Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.Gowa.
- Anonim.2015. Laporan Tahunan.Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.Gowa.
- Anonim.2016. Laporan Tahunan.Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.Gowa.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2005. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta
- Bastian Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud. *Acta Diurna*, vol. - (-) : 1-23

- Campbell. 2009. Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora. Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Dharmayanti (2012) Efektivitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Makassar. (Tidak dipublikasikan).
- Devas, Nick, dkk. 2007. Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Penerbit : Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta
- Edi Yuliana Putra (2015) Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Barang, Modal dan Bantuan Sosial pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I. Jurnal (Tidak dipublikasikan)
- Eko Santoso (2011) Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr. 2006. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan. Penerbit : Binarupa Aksara, Jakarta
- Harun (2007) Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses 25 Oktober 2015. Hal. 1.
- Harlina (2014) Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Barang dan Modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II. Jurnal tidak dipublikasikan
- Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep Dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Hidayat. 2008. Definisi Efektivitas, Penerbit : Angkasa, Bandung
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi ketiga. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Handyaningrat, Suwarno. 2004. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Penerbit : Haji Masagung. Jakarta
- Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik, (2015) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Sulawesi Utara..Jurnal EMBA 33Vol.3No4Desember2015, Hal.33-43.

Kindangen (2012) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT.Manado

Mardiasmo. 2010.Akuntansi SektorPublik. Penerbit : Andi Offset,Yogyakarta

Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi kelima, cetakan pertama, Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, cetakan pertama, Penerbit : Refika Aditama, Bandung

Masruri. 2014. Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (*Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010*). *Governance and Public Policy*, vol. 1 (1): 53-76

Mewengkang (2010)Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi SulawesiUtara. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado

Menteri Keuangan, Undang-Undang Nomor 17, 2003. "Keuangan Negara". Departemen Keuangan, Jakarta.

Menteri Keuangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004. "Perbendaharaan Negara". Departemen Keuangan, Jakarta.

Menteri Keuangan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004."Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara". Departemen Keuangan, Jakarta.

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.06/2007. "Penatausahaan Barang Milik Negara".

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012. "Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 94/PMK.02/2013."Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL".

- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 194 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013. "Perubahan Atas PMK No. 94/PMK.02.3013 Petunjuk Penyusunan dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)".
- Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 154/PMK.05/2013 "Pelaksanaan *Piloting* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara".
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran. Edisi kelima. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan Dedy dan dkk, 2012. Akuntansi Pemerintahan, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Nurlan Darise, 2011 Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Gorontalo : Cetakan Kedua : Indeks
- Permendagri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah jo permendagri No 11 tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri NO 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon dan Novi Budiarmo, (2015) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA 23Vol.3No.4Desember2015, Hal.23-32.

- Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. 2009. "Media keuangan"
Edisi Vol. IV No.24/Juli/2009.
- Sekretaris Jenderal Perbendaharaan. 2013. "Treasury Indones
Efektivitas Efisiensi". Edisi ke-1/2013.
- Steers, Richard M, 2008, Efektivitas Organisasi, Terjemahan, Mahdalena
Jamin ,Penerbit : PPM, Erlangga. Jakarta
- S.P. Siagian, 2008. Filsafat Administrasi, Penerbit :Gunung Agung,
Jakarta
- Siswanto Sastrohadiwiryono. 2008. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
Pendekatan Administrasi dan Operasional. Penerbit : Bumi Aksara,
Jakarta
- Soerjono Soekanto,2009,PerananSosiologi Suatu Pengantar,
edisiBaru,Penerbit :Rajawali Pers, Jakarta
- Syafie,Ihu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik
Indonesia(SANKRI).Penerbit :Bumi Aksara. Jakarta
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005.Manajemen Publik. Penerbit : Gramedia
WidiasaranaIndonesia, Jakarta
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban
Negara
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
AntaraPemerintah Pusat dan Daerah.